

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bidang keuangan adalah bidang yang begitu penting di dalam sebuah lembaga. Baik itu perusahaan maupun pemerintahan, baik yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak, pasti akan mencurahkan perhatian yang sangat besar di bidang keuangan. Pada era globalisasi saat ini membuat perkembangan informasi, teknologi, dan komunikasi yang semakin pesat menuntut keterbukaan informasi di segala aspek bidang terutama di bidang keuangan.

Pemerintah sebagai suatu lembaga organisasi yang diberi kekuasaan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan suatu bangsa dan negara. Maka dari itu tujuan utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan tersebut dimasa yang akan datang. Peningkatan dari pelayanan tersebut akan membuat maju suatu negara. Maju dan berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti investasi, angkatan kerja, inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.

Dalam upaya mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan berkembang maka kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus terhadap sektor yang strategis dan potensial yang ada di wilayah tersebut baik

sektor riil, finansial, maupun infrastruktur. Selain itu monitoring dan evaluasi atas hasil pembangunan juga penting dilakukan secara berkala agar dapat mengukur sejauh mana pemerintahan telah dilaksanakan. Peran pemerintah sangat penting dalam keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, untuk dapat semakin berkembang, pemerintah harus mengukur dan menganalisis kinerja pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan, agar pemerintah termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelimpahan wewenang pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan, dalam hal ini Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah

dituntut guna dapat meningkatkan kinerja dari perangkat daerah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi Kinerja analisis laporan keuangan terhadap pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. analisis kinerja laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak. Tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat sebuah keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu evaluasi dan evaluasi kinerja analisis laporan keuangan.

Sebagaimana menurut Mahmudi (2019: 85) untuk bisa menganalisis kinerja pemerintah daerah secara komprehensif dan mendalam bahwa laporan keuangan perlu memahami tahapan dan berbagai metode analisis laporan keuangan. Tahap-

tahap analisis laporan keuangan merupakan urutan-urutan langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan metode analisis merupakan berbagai teknik atau cara untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan sehingga memberikan makna tertentu yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Evaluasi kinerja laporan keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan dasar memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan penyusunannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Sampang. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kabupaten Sampang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisaptia, Y (2016) menunjukkan bahwa isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pelaporan Informasi Kinerja berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pelimpahan wewenang pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan, dalam hal ini Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus segala kepentingan daerah masing-masing, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari Perangkat Daerah tersebut. Kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sampang saat ini dilihat dari Rasio Keuangan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan Pembangunan Daerah apabila jika dilihat dari rasio neraca, pemerintah daerah Kabupaten Sampang memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah dan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur untuk menyalurkan dananya bagi pengembangan pembangunan Kabupaten Sampang (Anggi, 2018).

Pemerintah daerah yang menjadi pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak baik. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja laporan keuangan suatu daerah adalah dengan analisis rasio. Penelitian ini akan dilakukan pada pemerintah Kabupaten Sampang. Peneliti memilih penelitian di Kabupaten Sampang karena pada kabupaten tersebut kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja

keuangan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa evaluasi kinerja analisis laporan keuangan sangat penting dalam sebuah organisasi, anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang terdapat dalam anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Evaluasi kinerja analisis laporan keuangan pada suatu instansi sangatlah erat kaitannya dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana (*planning*), pengkoordinasian kerja (*coordinating*) dan pengawasan kerja (*controlling*). Oleh karena itu anggaran hanyalah sebagai alat bagi manajemen. Anggaran terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pemerintahan karena bersifat rutin atau terjadi terus menerus. Belanja ini penting karena belanja barang dan jasa berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara keseluruhan, biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pemberian jasa-jasa kepada setiap fungsi pemerintahan. Maka evaluasi kinerja analisis laporan keuangan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah dalam evaluasi kinerja analisis laporan keuangan cukup efektif sebagai alat pengendalian manajemen.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Karina dan Noerainy (2019) yaitu “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu yaitu: 1) Penelitian ini menggunakan objek Kabupateng Sampang 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan Tahun 2011-2021, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2008-2012.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan Penelitian dengan judul **“Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011-2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis yaitu Bagaimanakah Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011-2021?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diperlukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi kinerja rasio keuangan pemerintah daerah kabupaten sampangTahun 2011-2021.
2. Penelitian ini hanya dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan mengacu pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Sampang, sehingga kesimpulan pada penelitian ini hanya berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Instansi

Penelitian ini dijadikan evaluasi dan tolak ukur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta memberikan sumbangan pemikiran tentang evaluasi kinerja analisis laporan keuangan sebagai alat pengendalian manajemen.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah guna menentukan kebijakan serta menentukan strategi agar perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Sebagai bahan pembandingan dalam melakukan Penelitian lebih lanjut pada bidang kajian evaluasi laporan keuangan dan juga sebagai ruang belajar meningkatkan pengalaman penulis dalam bidang akuntansi.

d. Bagi Masyarakat

Menambah informasi dan pengetahuan pihak lain terhadap penggunaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.